

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2025

Nomor: 079.1/AI.08/LAP/H/2026



Hubungi kami:

inspektorat.bkn@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Inspektorat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2025 adalah suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Inspektorat BKN.

Laporan Kinerja ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, kendala dalam pencapaian target kinerja serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BKN Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai kinerja Inspektorat pada tahun 2025. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi Inspektorat ke depannya.

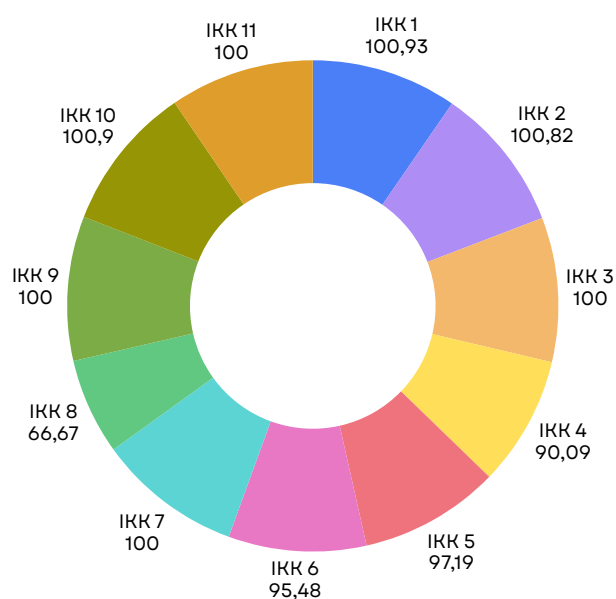
Jakarta, 3 Juli 2026
Inspektur,

\$

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKN.

Pada tahun 2025, Inspektorat memiliki 4 Sasaran Kegiatan yang diturunkan ke dalam 11 Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Inspektorat 2025.



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Kinerja Utama Inspektorat adalah 958.52 (Baik) dengan rincian IKK yang capaiannya di atas 100% dengan kategori “sangat baik” adalah IKK 1 (100,93%), IKK 2 (100.82%), IKK 3 (100), IKK 10 (100.90%). Terdapat 6 IKK dengan kategori “Baik” dengan rentang penilaian diantara 80-100% yaitu IKK 3 (100,00%), IKK 4 (90,09%), IKK 5 (97,19%), IKK 6 (95,48%), IKK 7 (100,00%), IKK 9 (100,00%), dan IKK 11 (100,00%). Sedangkan IKK yang berada pada kategori “kurang” terdapat 1 IKK yaitu IKK 8 (66.67%).

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025, Inspektorat didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Tahun 2025 (cetakan ke 5) tanggal 31 Oktober 2025 yang kemudian setelah *refocusing* anggaran pada tahun 2025 Inspektorat memiliki pagu anggaran sebesar Rp697.816.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp697.067.841,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) pada persentase realisasi 99.89% dengan sisa anggaran Rp748.159,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau 0.11%.

Dalam pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Badan Kepegawaian Negara telah sesuai dengan kode etik dan standar Audit yang berdasarkan pada peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tugas, Fungsi, dan Gambaran Organisasi	4
1.3. Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis.....	9
2.2. Sasaran Kegiatan.....	9
2.3. Perjanjian Kinerja 2025	10
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja.....	13
3.2. Analisis Kinerja	16
3.3. Capaian Anggaran	53
BAB. IV PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Rekomendasi/Masukan	57
Daftar Lampiran.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	6
Tabel. 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025	10
Tabel. 3 Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2025.....	12
Tabel. 4 Balance Scorecard (BSC)	13
Tabel. 5 Realisasi IKK Inspektorat Tahun 2025.....	14
Tabel. 7 Komponen Penilaian Skor Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2025.....	23
Tabel. 8 Rencana Aksi RB Inspektorat Tahun 2025.....	26
Tabel. 9 Rekapitulasi Service Level Agreement (SLA) Inspektorat Tahun 2025.....	30
Tabel. 10 Rekapitulasi Pelaporan Kinerja Harian Inspektorat Tahun 2025.....	33
Tabel. 11 Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Inspektorat Tahun 2025.....	36
Tabel. 12 Rencana dan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2025.....	54

GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Organisasi Inspektorat BKN	5
Gambar. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025	7
Gambar. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	7
Gambar. 4 Internalisasi Penyelenggaraan SPIP	42
Gambar 5. Entry Meeting APIP BKN dengan Tim Evaluator BPKP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan Inspektorat BKN melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025 serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Gambaran Organisasi

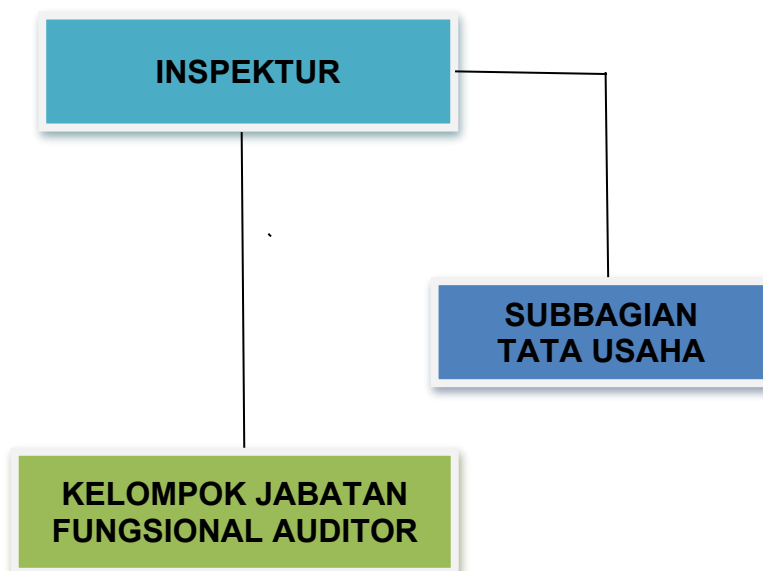
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, di lingkungan BKN dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, serta dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan BKN. Untuk menjalankan tugas tersebut Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambar. 1
Struktur Organisasi Inspektorat BKN

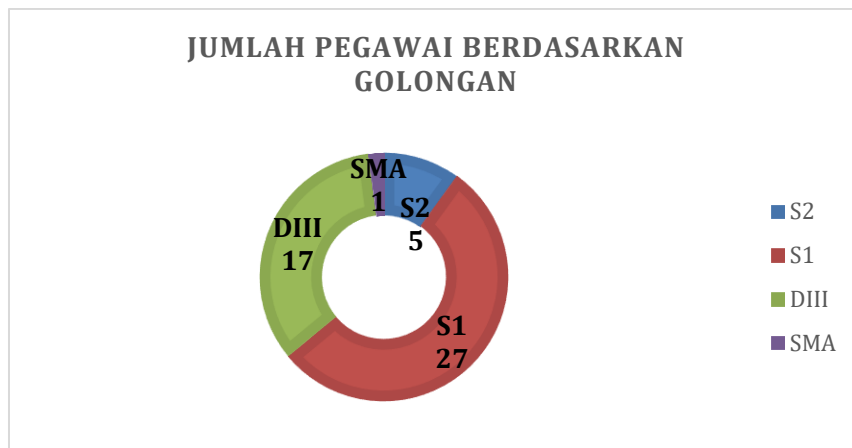


Tabel. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Jabatan	Jumlah
Plt. Inspektur	1
Kepala Subbagian Tata Usaha	1
Auditor Madya	7
Auditor Muda	3
Auditor Pertama	15
Auditor Penyelia	1
Auditor Mahir	3
Auditor Terampil	5
Arsiparis Terampil	1
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Pengadministrasi Perkantoran	1
CPNS Auditor Pertama	4
CPNS Auditor Terampil	7
J U M L A H	51

Pada tahun 2025 Inspektorat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) pegawai dengan komposisi seperti pada tabel di atas. Saat ini pegawai dengan jabatan Auditor Pertama menempati komposisi terbesar dengan jumlah 15 orang atau 29% dari total pegawai.

Gambar. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025



Berdasarkan diagram di atas pada tahun 2025 Inspektorat didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan komposisi jenjang pendidikan S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 27 orang, DIII sebanyak 17 orang dan SMA sebanyak 1 orang, sehingga pegawai dengan jenjang Pendidikan S1 menempati komposisi terbesar yaitu 54% dari total pegawai.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin per Desember 2025 di lingkungan Inspektorat mayoritas wanita sebanyak 34 orang (68%) dan pria sebanyak 16 orang atau 32% dari jumlah pegawai.

Gambar. 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



1.3. Isu Strategis

Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan menghadapi beberapa isu strategis diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas dan Kinerja Inspektorat BKN belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi;
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern belum optimal;
3. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang belum terpenuhi sesuai dengan target pada Peta Jabatan;

Dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada, maka disusunlah 4 Sasaran Kegiatan dengan 11 Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Inspektorat 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat merupakan turunan dari Rencana Strategis yang ada di BKN dengan menetapkan visi dan misi yang selaras dengan tujuan organisasi. Dokumen Rencana Strategis diharapkan dapat menjadi dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengukuran, serta evaluasi terhadap kinerja Inspektorat selama rentang 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta melihat latar belakang dan mencermati kondisi yang ada, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat berpedoman pada visi BKN, yaitu: *"Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam Rangka Mendukung Visi Presiden, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Inspektorat melaksanakan misi kedua BKN yaitu: *"Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governasi internal BKN"*.

Dalam mendukung visi dan misi Badan Kepegawaian Negara, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkungan BKN maka Inspektorat mengemban 4 Sasaran Kegiatan dengan 11 Indikator Kinerja Kegiatan.

2.2. Sasaran Kegiatan

Inspektorat memiliki 4 Sasaran Kegiatan yang keseluruhannya termasuk di dalam *Learning and Growth perspective* yaitu:

SK.1 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN

SK.2 Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah

SK.3 Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN

SK.4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN

2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel. 2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

Kode SK	SASARAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Learning and Growth Perspectives				
SK.1.	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK.1	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87
		IKK.2	Skor Evaluasi AKIP Inspektorat	73
		IKK.3	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat	100
		IKK.4	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat	90

Kode SK	SASARAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
			Maksimal 5 Hari Inspektorat	
SK.2	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah	IKK.5	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat	100
SK.3	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN	IKK.6	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	89.4
		IKK.7	Hasil Penilaian Penjamin Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	4
		IKK.8	Level Kapabilitas APIP	3
		IKK.9	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat	1
SK.4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.10	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat	99
		IKK.11	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Inspektorat	0

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025, Inspektorat didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.350.000.000** (satu milyar

tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan [Petunjuk Operasional Kegiatan \(POK\) Inspektorat Tahun 2025 \(cetakan ke-5\)](#) tanggal 31 Oktober 2025 yang kemudian setelah *refocusing* anggaran pada tahun 2025 Inspektorat memiliki pagu anggaran sebesar Rp697.816.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk dipergunakan secara optimal dalam mendukung seluruh kegiatan pendukung yang telah direncanakan. Adapun alokasi anggaran sesuai POK Inspektorat cetakan ke-5 per target kinerja yaitu:

Tabel. 3
Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	0
2	Skor Evaluasi AKIP Inspektorat	0
3	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat	175,500,000
4	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari Inspektorat	0
5	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat	0
6	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	981,160,000
7	Hasil Penilaian Penjamin Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	139,620,000
8	Level Kapabilitas APIP	53,720,000
9	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat	0
10	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat	0
11	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Inspektorat	0
TOTAL		1.350.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara diukur dengan pendekatan konsep *Balance Scorecard* (BSC) yaitu *stakeholder, customer, internal process* dan *learn and growth* yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1.8/KEP/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Tabel. 4
Balance Scorecard (BSC)

Keterangan		Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	Lebih dari 100	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79	Kuning
4	Kurang	Kurang dari 49	Merah
5	Belum ada Skor		Putih

NKP: NILAI KINERJA PERSPEKTIF

NSK: NILAI SASARAN KEGIATAN

NPSK: NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN

Tabel. 5
Realisasi IKK Inspektorat Tahun 2025

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Realisasi	%	Status	NSS	NKP
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>							96.65
SK.1	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN					97.96	
IKK.1	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87	87.81	100.93%			
IKK.2	Skor Evaluasi AKIP Inspektorat	73	73.60	100.82%			
IKK.3	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat	100	100	100.00%			
IKK.4	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Inspektorat	90	81.08	90.09%			
SK.2	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah					97.19	
IKK.5	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Inspektorat	100	97.19	97.19%			
SK.3	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN					98.49	
IKK.6	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	89.4	85.36	95.48%			
IKK.7	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	4	4	100.00%			
IKK.8	Level Kapabilitas APIP	3	2	66.67%			
IKK.9	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan	1	1	100.00%			

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Realisasi	%	Status	NSS	NKP
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>							96.65
	kualitas layanan di Inspektorat						
SK.4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN					100.45	
IKK.10	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat	99	99.89	100.90%			
IKK.11	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat	0	0	100.00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Kinerja Utama Inspektorat adalah 958.52 (Baik) dengan rincian IKK yang capaiannya di atas 100% dengan kategori “sangat baik” adalah IKK 1 (100,93%), IKK 2 (100.82%), IKK 10 (100.90%). Terdapat 6 IKK dengan kategori “Baik” dengan rentang penilaian diantara 80-100% yaitu IKK 3 (100,00%), IKK 4 (90,09%), IKK 5 (97,19%), IKK 6 (95,48%), IKK 7 (100,00%), IKK 9 (100,00%), dan IKK 11 (100,00%). Sedangkan IKK yang berada pada kategori “kurang” terdapat 1 IKK yaitu IKK 8 (66.67%).

3.2. Analisis Kinerja

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN

IKK.1. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87.00	87.50	88.00	88.50	90.00	87.81	n/a	n/a	n/a	n/a	100.93	97.57

Sesuai dengan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
5. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Inspektorat;
6. Mengetahui tingkat kepuasan pegawai BKN terhadap kualitas layanan yang diberikan Inspektorat, baik yang dirasakan oleh unit kerja di Kantor Pusat maupun satuan kerja Kantor Regional BKN;

7. Sebagai umpan balik bagi seluruh unit kerja BKN terhadap kinerja layanan yang diberikan;
8. Sebagai masukan bagi pegawai di lingkungan Inspektorat dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan;
9. Sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di Inspektorat.

Pada Triwulan IV tahun 2025 telah diterbitkan dan disampaikan ke seluruh satuan kerja Nota Dinas nomor: 307/PR.06.01/ND/H/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Layanan Inspektorat periode Semester II Tahun 2025, pada Nota Dinas berisi tautan survei ditujukan untuk diisi oleh pengguna jasa Inspektorat yakni auditee di seluruh satuan kerja Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pada Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester II Tahun 2025 disampaikan bahwa survei diisi 135 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 87.81, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik).

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan dari 9 unsur. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Berdasarkan hasil pengolahan data dari responden survei diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 6
Nilai rata-rata Sub Unsur Tahun 2025

Unsur	No.	Pernyataan	NILAI	NILAI PER UNSUR
Persyaratan	1.	Dokumen kelengkapan yang diminta Auditor mudah dipahami	3.41	3.49
	2.	Pegawai Inspektorat bebas dari kepentingan pribadi dan golongan	3.50	
	3.	Pegawai Inspektorat tidak menyalahgunakan wewenang	3.56	
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Isi Laporan Hasil Audit/Reviu bermanfaat bagi Satker/Unit kerja dan mudah dipahami	3.47	3.45
	2.	Isi Laporan Hasil Audit/Reviu sesuai dengan fakta dilapangan	3.47	
	3.	Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan di Inspektorat mudah dimengerti dan dipahami	3.41	
Waktu Penyelesaian	1.	Pelayanan yang diberikan Inspektorat Tepat Waktu	3.46	3.44

Unsur	No.	Pernyataan	NILAI	NILAI PER UNSUR
	2.	Laporan Hasil Audit/Reviu disampaikan Tepat Waktu	3.43	
Biaya Tarif	1.	Pelayanan yang diberikan Inspektorat Gratis	3.73	3.73
	2.	Pegawai Inspektorat dalam memberikan pelayanan kepada Satker/Unit Kerja tidak mengharapkan imbalan berupa Uang, Barang dan Fasilitas	3.74	
Produk Spesifikasi Jenis Layanan	1.	Layanan yang diberikan oleh Inspektorat telah sesuai dengan kebutuhan Satker/Unit Kerja	3.53	3.50
	2.	Inspektorat telah memberikan Layanan konsultasi yang optimal terkait permasalahan yang dihadapi satker/unit kerja	3.49	
	3.	Inspektorat bekerjasama dengan baik dalam melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi	3.51	
	4.	Inspektorat telah memberikan pendampingan yang optimal dalam penyusunan profil risiko unit	3.47	
Kompetensi Pelaksana	1.	Pegawai Inspektorat memiliki kemampuan bekerja sama dengan baik	3.53	3.52
	2.	Pegawai Inspektorat telah memiliki Kompetensi Teknis yang Memadai	3.48	
	3.	Pegawai Inspektorat telah bekerja dengan menunjukkan Integritas yang Tinggi	3.56	
Perilaku Pelaksana	1.	Berkomunikasi dengan lancar saat memberikan pelayanan	3.54	3.56
	2.	Ramah dan santun dalam memberikan pelayanan	3.53	
	3.	Berpenampilan rapi dalam memberikan pelayanan	3.59	
	4.	Pegawai Inspektorat tidak memberikan perlakuan khusus pada orang tertentu	3.57	

Unsur	No.	Pernyataan	NILAI	NILAI PER UNSUR
	5.	Inspektorat telah melakukan kampanye/Himbauan anti korupsi dan Gratifikasi	3.61	
	6.	Pegawai Inspektorat yang berurusan dengan Satker/Unit Kerja telah melaksanakan tugas dengan baik	3.51	
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Inspektorat menerima keluhan/Permasalahan dengan baik	3.48	3.47
	2.	Inspektorat telah menindaklanjuti dengan cepat dan tepat keluhan/permasalahan yang diajukan Satker/Unit Kerja	3.48	
	3.	Inspektorat memberikan saran/rekomendasi/ asistensi yang tepat dan dapat diaplikasikan	3,45	
	4.	Inspektorat telah memberikan layanan yang dapat meningkatkan/memperbaiki kinerja dari Satker/Unit Kerja	3.46	
	5.	Inspektorat telah memproses segala Bentuk Pelanggaran yang dilakukan PegawaiBKN sesuai ketentuan yang berlaku	3.48	
		Inspektorat telah memberikan perlindungan (menjaga kerahasiaan pelapor) terhadap laporan pengaduan	3.50	
		Inspektorat telah menindaklanjuti Laporan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.	3.45	
Sarana dan Prasarana	1.	Inspektorat telah memiliki tata cara dan pedoman menerima laporan pengaduan	3.51	3.44
	2.	Inspektorat telah menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan oleh Satker/Unit Kerja	3.38	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai terkecil berada di unsur “waktu pelaksanaan” dan unsur “sarana dan prasarana” dengan skor yang sama yaitu 3.44. Hal ini menjadi

catatan bagi Inspektorat agar Pelayanan yang diberikan dapat diselesaikan dengan tepat waktu serta meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pendampingan pada unit kerja. Sementara nilai tertinggi ada pada unsur 4 dengan skor 3,73, yaitu “Biaya Tarif”. Hal ini menjadi poin positif yang harus dipertahankan bahwa Pelayanan yang diberikan Inspektorat gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

Dibandingkan hasil survei Tahun 2024 dengan nilai 87,07 terdapat kenaikan sebesar 0.74 menjadi 87.81 untuk realisasi tahun 2025 dan capaian tahun 2025 yaitu 100.93% dengan capaian jangka menengah 97.57%. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target diantaranya yaitu:

1. Melakukan rapat capaian mingguan sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan internal di Inspektorat;
2. Telah dibentuknya tim pembinaan dan konsultasi untuk setiap unit kerja ataupun satuan kerja;
3. Disediakkannya formulir konsultasi secara daring melalui *goohle form* sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala BKN Nomor 617 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Layanan Konsultasi Inspektorat di lingkungan BKN.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan terlihat dari nilai terkecil pada unsur survei “waktu pelaksanaan” dan “sarana dan prasarana”. Sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan layanan Inspektorat adalah penyusunan tim pembinaan anggaran dan kinerja, internalisasi tata cara konsultasi melalui layanan aplikasi *consulting*, serta internalisasi tata cara pengaduan melalui aplikasi WBS.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.1	87.00	87.81	100.93	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, IKK.1 diperoleh tingkat efisiensi 0% dikarenakan tidak terdapat pagu anggaran dalam mendukung realisasi kinerja yang berhasil 0.91 lebih tinggi dari target kinerja.

IKK.2. Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat	73	73.5	74	74.5	75	73.60	n/a	n/a	n/a	n/a	100.82	98.13

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik masyarakat.

Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN tahun 2025 berdasarkan penilaian Tim Evaluator yang disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Inspektorat BKN Nomor [113/AI.03/LHE/H/2025](#) tanggal 21 November 2025, memperoleh nilai sebesar **73.60** (tujuh puluh tiga koma enam puluh) dengan kategori BB (Sangat Baik, akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level

administrator/koordinator). Adapun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 7
Komponen Penilaian Skor Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Skor Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	23.70
2	Pengukuran Kinerja	30	23.10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80
4	Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.00
Skor Hasil Evaluasi			73.60
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sesuai tabel di atas skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN dengan target skor 73.00 dan realisasi skor yang diperoleh 73.60, sehingga capaian kinerja pada Tahun 2025 diperoleh 100.82% dan capaian jangka menengah pada 98.13% dimana Inspektorat berhasil mencapai nilai 0.60 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai target yaitu diantaranya optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelaporan maupun evaluasi kinerja, telah disusunnya dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja serta adanya rapat

internal capaian berkala baik mingguan maupun triwulanan dalam memantau proses dan rencana kegiatan berjalan selaras dengan PKPT 2026.

Telah diterbitkan pula dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam penilaian skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada IKK. 2 diantaranya yaitu:

1. Dokumen data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan dengan realisasi yang dituangkan pada dokumen Laporan Kinerja;
2. Kurangnya koordinasi antara tim penyusun dengan tim pembina dalam penyesuaian pada aspek pengukuran maupun penyusunan kinerja;
3. Aplikasi MAKO masih dalam pengembangan fitur sehingga dokumen perencanaan maupun pelaporan Tahun 2025 belum bisa disampaikan pada aplikasi MAKO secara optimal.

Rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan oleh Inspektorat diantaranya yaitu:

1. Dokumen data kinerja yang dikumpulkan agar relevan dengan realisasi yang dituangkan pada dokumen Laporan Kinerja;
2. Berkoordinasi dengan tim pembina apabila terdapat penyesuaian pada aspek pengukuran maupun penyusunan kinerja dan dalam pemanfaatan fitur pada aspek perencanaan serta pelaporan Tahun 2025 melalui aplikasi MAKO;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Hasil Evaluasi tahun 2025.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.2	73.00	73.60	100.82	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, IKK.2 diperoleh tingkat efisiensi 0% dikarenakan tidak terdapat pagu anggaran dalam mendukung realisasi kinerja yang berhasil 0.60 lebih tinggi dari target kinerja.

IKK.3. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100

Pelaksanaan RB Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025 yang merupakan batas periode akhir waktu pencapaian target menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Berbagai strategi telah dicoba diterapkan khususnya di tingkat nasional untuk mengakselerasi pencapaian target birokrasi Nasional, sebagaimana terlihat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Inspektorat Badan Kepegawaian Negara berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa salah satunya ditunjukkan dengan keseriusan dan komitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Rencana Aksi RB Inspektorat Tahun 2025 terdiri dari 4 Kegiatan Utama yang diturunkan menjadi 17 rencana aksi sebagai berikut:

Tabel. 8
Rencana Aksi RB Inspektorat Tahun 2025

Kegiatan Utama	Rencana Aksi
Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP Tahun 2024
	Melaksanakan bimtek aplikasi SPIP terintegrasi pada Satker penyelenggara Penilaian Mandiri di Lingkungan BKN
	Melakukan reviu / evaluasi penyusunan profil risiko entitas BKN
	Melakukan konsultasi penyusunan profil risiko TA 2025 di Lingkungan BKN
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Membuat konten/ <i>flyer</i> terkait pengendalian gratifikasi hari raya dilingkungan BKN
	Sosialisasi tentang Gratifikasi, Benturan Kepentingan, SPI, dan WBS di lingkungan BKN.
	Penyusunan draf revisi Kepka Benturan Kepentingan di Lingkungan BKN
	Membuat Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi KPK berdasarkan hasil Laporan SPI KPK Tahun 2024, saat membuat matriks tindak lanjut berkoordinasi dengan tim terkait yang berhubungan dengan rekomendasi dari KPK
	Memonitoring rencana aksi yang telah dibuat pada matriks tindak lanjut hasil SPI KPK Tahun 2024

Kegiatan Utama	Rencana Aksi
	Mengirim Nota Dinas Permintaan Data ke Unit Kerja
	Menyiapkan dokumen yang diminta oleh KPK, yaitu : - Form kepesertaan - Data karakteristik BKN - Data populasi : 1. Data populasi pegawai Internal BKN 2. Data populasi eksternal (pengguna layanan BKN, Penyedia terkait PBJ) 3. Data eksper (mantan JPT Pratama/ JPT Madya yang telah pensiun, BPK, Kemenpan RB, BPKP)
	Monitoring dan evaluasi penanganan WBS untuk pengaduan langsung
Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Mengidentifikasi unit/ satuan kerja akan diajukan untuk penilaian WBK
	Melakukan pendampingan terhadap unit/satuan kerja yang akan diajukan untuk WBK
	Penguatan Internalisasi Pelaksanaan RB, Zona Integritas, WBK, dan WBBM kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKN, baik BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN.
	Monitoring tindaklanjut atas rekomendasi LHE Zona Integritas yang diterbitkan Menpan.
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Monitoring Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Berdasarkan pemantauan pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Triwulan IV 2025 dapat diinformasikan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV dari total 17 (tujuh belas) kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan Triwulan IV tahun 2025.

Sehingga Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat sesuai dengan formula yang ditetapkan pada manual IKK yaitu:

Formula:

Membandingkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sudah ditetapkan dengan yang sudah terlaksana

$$N = A/B \times 100\%$$

N = Persentase terlaksananya rencana aksi RB Inspektorat

A = Jumlah rencana aksi RB yang telah dilaksanakan

B = Jumlah rencana aksi RB yang direncanakan

$N = 17/17 \times 100\% = 100\%$ dengan capaian tahun 2025 sebesar 100% serta capaian jangka menengah sebesar 100%. Sebagai upaya dalam mempertahankan capaian telah dilakukan koordinasi ataupun monitoring secara berkala terhadap seluruh rencana aksi dari setiap tim pengampu. Kendala yang ditemui adalah terdapat perubahan atau penyesuaian waktu pengerjaan rencana aksi baik dikarenakan pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan pengawasan internal lainnya ataupun karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang mengerjakan. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan tim pengampu dan tim sekretariat komite;
2. Penyusunan Rencana Aksi RB Inspektorat 2026;
3. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB Triwulanan Tahun 2026

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.3	100	100	100	175.500.000	0	0

Berdasarkan tabel di atas, IKK.3 diperoleh tingkat efisiensi 0% dikarenakan tidak memiliki pagu anggaran maupun realisasi anggaran dalam melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja 92.63%.

IKK.4. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari Inspektorat	90	90	90.5	90.5	91	81.08	n/a	n/a	n/a	n/a	90.09	89.10

Persuratan merupakan salah satu fungsi pendukung utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang efektif, tertib, dan tepat waktu menjadi prasyarat penting dalam mendukung kelancaran proses pengawasan intern, pelayanan administrasi, serta akuntabilitas kinerja organisasi. Dalam rangka menjamin kualitas layanan persuratan, Inspektorat BKN menerapkan *Service Level Agreement* (SLA) sebagai standar waktu penyelesaian penanganan surat. SLA berfungsi sebagai tolok ukur kinerja, serta untuk monitoring dan evaluasi agar memastikan setiap surat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan [Laporan Monitoring Service Level Agreement](#) (SLA) Inspektorat Tahun 2025 diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel. 9
Rekapitulasi Service Level Agreement (SLA) Inspektorat Tahun 2025

No	Bulan	Surat Masuk	Nota Dinas	Total Surat	SLA ≤ 5 Hari	SLA > 5 Hari
1	September	62	78	140	98	42
2	Oktober	66	59	125	113	12
3	November	57	47	104	71	33
4	Desember	62	50	112	108	4
	TOTAL			481	390	91

Seperti tertuang pada tabel di atas, dari total 481 surat yang diterima selama periode September s.d. Desember 2025, sebanyak 390 surat telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar SLA (≤ 5 hari kerja), sedangkan 91 surat belum memenuhi SLA (> 5 hari kerja) sehingga diperoleh Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 hari kerja di Inspektorat dihitung dengan membandingkan jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti paling lambat 5 hari kerja terhadap seluruh surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang memerlukan tindak lanjut, dikalikan 100%, sehingga sesuai formula pada manual IKK diperoleh realisasi $390/481 \times 100\% = 81.08\%$ dengan capaian tahun 2025 sebesar 90.09% serta capaian jangka menengah sebesar 89.10%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja persuratan telah mendekati target yang ditetapkan, upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu Subbagian Tata Usaha melakukan monitoring dan mengingatkan pegawai secara rutin untuk mengecek akun tekan digital masing-masing serta melakukan rekapitulasi surat masuk di Inspektorat

Kendala yang dihadapi sehingga capaian belum sesuai target diantaranya yaitu:

1. Belum optimalnya pemantauan SLA secara berkala;

2. Perbedaan tingkat pemahaman pegawai terhadap pentingnya SLA;
3. Keterbatasan sistem dalam memberikan notifikasi keterlambatan;
4. Masih adanya proses manual dalam pengelolaan persuratan.

Dari kendala yang dihadapi tersebut, sehingga rekomendasi yang akan dilakukan diantaranya yaitu:

1. Dilakukan pemantauan SLA secara rutin baik harian, mingguan ataupun bulanan oleh Subbagian Tata Usaha khususnya oleh pengelola arsip;
2. Pelaksanaan sosialisasi atau pembinaan kepada seluruh pegawai terkait kebijakan SLA persuratan termasuk penyampaian konsekuensi keterlambatan dan keterkaitannya dengan capaian kinerja unit kerja, serta persamaan persepsi dalam menjalankan fitur pada teken digital;

Adapun IKK 4 termasuk IKK yang baru muncul di triwulan III tahun 2025 setelah terdapat penyesuaian PK Inspektorat. Sehingga capaian pada Triwulan I - II tidak dapat dihitung atau diperbandingkan dengan capaian pada Triwulan III – IV Tahun 2025 ataupun dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.4	90	81.08	90.09	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, IKK.4 diperoleh tingkat efisiensi 0% dikarenakan tidak memiliki pagu anggaran maupun realisasi anggaran dalam melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja 100%.

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah

IKK.5. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat	100	100	100	100	100	97.19	n/a	n/a	n/a	n/a	97.19	97.19

Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SI.02.01/ND/K/2025 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Negara dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 351/KP.13.01/ND/A/2025 Tahun 2025 tentang Pelaporan dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2025 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2026 maka dalam rangka mengimplementasikan digitalisasi birokrasi yang efektif dan efisien di lingkungan BKN khususnya dalam aspek peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pegawai serta mewujudkan penyelarasan kinerja pegawai yang berdampak pada kinerja organisasi maka seluruh pegawai BKN wajib melaporkan kinerja hariannya melalui aplikasi e-kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengisian kinerja harian mencakup rencana aksi yang selaras dengan rencana hasil kerja periode berjalan, tanggal kegiatan, jam mulai hingga selesai kegiatan, rencana kegiatan harian, sumber data,

jumlah realisasi kegiatan, serta bukti dukung realisasi. Sebagai bentuk akuntabilitas pelaporan kinerja, maka pengisian kinerja harian dimonitoring secara berkala setiap hari kerja dan pada akhir periode penilaian bulanan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan [Laporan rekapitulasi](#) pengisian kinerja harian Inspektorat periode September sampai dengan Desember 2025 diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel. 10
Rekapitulasi Pelaporan Kinerja Harian Inspektorat Tahun 2025

No.	Periode Penilaian	Jumlah Pegawai	Persentase Pegawai	
			Mengisi Kinerja Harian	Tidak Mengisi Kinerja Harian
1.	16 September – 15 Oktober 2025	51	96.43%	3.57%
2.	16 Oktober – 15 November 2025	51	96.79%	3.21%
3.	16 November – 15 Desember 2025	51	96.92%	3.08%
4.	16 – 31 Desember 2025	51	98.63%	1.37%

Berdasarkan tabel di atas dari total 51 pegawai Inspektorat yang melaporkan kinerja harian, persentase capaian tertinggi diperoleh pada periode penilaian kinerja 16 – 31 Desember 2025 dengan persentase pegawai mengisi kinerja harian 98.63% dan tidak mengisi kinerja harian 1.37%. Adapun persentase pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat pada tahun 2025 yaitu 97.19% dengan membandingkan jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat terhadap jumlah seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat dikali 100%. Dengan demikian persentase pegawai yang mengisi E-Kinerja belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Sehingga

diperoleh realisasi 97.19% dengan capaian tahun 2025 sebesar 97.19% serta capaian jangka menengah sebesar 97.19%.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu Subbagian Tata Usaha mengingatkan pegawai secara rutin melalui grup WhatssApp untuk menyampaikan pelaporan kinerja harian serta melakukan monitoring pelaporan pengisian kinerja harian dengan menyusun rekapitulasi secara periodik.

Kendala yang dihadapi sehingga capaian belum sesuai target karena masih terdapat pegawai yang lupa dalam melaporkan kinerja harian secara rutin sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan, sehingga rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengingatkan pegawai secara rutin dan lebih intens melalui grup *WhatsApp* dan juga secara pribadi agar melaporkan kinerja harian masing-masing secara tepat waktu serta melakukan pelaporan pengisian kinerja harian dengan menyusun rekapitulasi secara periodik dan disampaikan ke Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Adapun IKK 5 termasuk IKK yang baru muncul di triwulan III tahun 2025 setelah terdapat penyesuaian PK Inspektorat. Sehingga capaian pada Triwulan I - II tidak dapat dihitung atau diperbandingkan dengan capaian pada Triwulan III – IV Tahun 2025 ataupun dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.5	100	97.19	97.19	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh tingkat efisiensi 0% dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan pada IKK.5 tidak memiliki pagu anggaran maupun realisasi anggaran dengan capaian kinerja 97.19%.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN

IKK.6. Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	89.40	91.30	93.20	95.10	97	85.36	n/a	n/a	n/a	n/a	95.48	88

Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan audit meliputi audit kinerja, audit keuangan, serta audit dengan tujuan tertentu.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu meliputi reviu laporan keuangan, reviu rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-K/L), revidir rencana kebutuhan barang milik negara, serta revidir lainnya.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi atas implementasi AKIP di lingkungan BKN.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan meliputi pemantauan atas tindak lanjut laporan hasil pengawasan maupun pemantauan lain yang tidak termasuk dalam pemantauan atas tindak lanjut laporan hasil pengawasan. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi, asistensi, maupun konsultasi.

Dari antara kegiatan-kegiatan tersebut, yang dapat menghasilkan rekomendasi dan dapat dilakukan pemantauan secara berkala oleh Inspektorat yaitu pelaksanaan audit, revidir, serta evaluasi atas implementasi AKIP unit kerja di lingkungan BKN. Berdasarkan [Laporan](#) Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat sampai dengan Semester II Tahun 2025 yang diterbitkan pada 13 Januari 2026, diperoleh hasil kegiatan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu:

Tabel. 11

Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Inspektorat tahun 2025

Kegiatan	Total Rekomendasi	Status		Realisasi Tahun 2025
		Sesuai	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
Audit	82	76	0	85.36%
Revidir	320	120	190	
Evaluasi	240	161	1	
Total	642	357	191	

Dari tabel di atas, pada kegiatan Audit total rekomendasi sebanyak 82 diperoleh berdasarkan 3 Laporan Hasil Audit sampai dengan semester II Tahun 2024 dan 12 Laporan Hasil Audit sampai dengan semester I Tahun 2025. Pada kegiatan Reviu total rekomendasi sebanyak 320 diperoleh berdasarkan 4 Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan pada Semester II Tahun 2025. Adapun pada kegiatan Evaluasi total rekomendasi sebanyak 240 diperoleh berdasarkan 21 Laporan Hasil Evaluasi atas Tahun 2024.

Adapun IKK 6 termasuk IKK yang baru muncul pada tahun 2025 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang ditindaklanjuti maka dilakukan penyesuaian formula dalam manual IKK pada awal tahun 2025 semula yaitu:

Formula:

$$(N/A) \times 100\%$$

N : Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal (evaluasi atas implementasi SAKIP)

A : Total rekomendasi pengawasan internal (evaluasi atas implementasi SAKIP)

Setelah perubahan Perjanjian Kinerja pada Juli 2025 maka formula dalam manual IKK menjadi:

Formula:

$$(N/A) \times 100\%$$

N = jumlah rekomendasi pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan sesuai (audit, reviu dan evaluasi AKIP)

A = Total rekomendasi pengawasan internal (audit, reviu dan evaluasi implementasi AKIP)

Sehingga realisasi IKK.6 sesuai dengan formula yang ditetapkan pada manual IKK yaitu:

$$(357/642) \times 100\% = 85.36\%$$

Maka diperoleh realisasi 85.36% dengan capaian tahun 2025 sebesar 95.48% serta capaian jangka menengah sebesar 88%. Upaya yang telah dilakukan yaitu membentuk tim

pemantauan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat, berkoordinasi dengan tim kerja lainnya dalam pengumpulan Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi serta Laporan Pengawasan Lainnya dan dilakukan penyusunan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi Inspektorat yang kemudian disampaikan melalui Nota Dinas kepada unit terkait.

Adapun hambatan yang ditemui sehingga belum berhasil mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan yaitu diantaranya:

1. Belum terdapat batasan dalam penentuan ruang lingkup pada perhitungan formula;
2. Belum optimalnya koordinasi antar *stakeholder* dalam menindaklanjuti temuan.

Maka rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan:

1. Melaksanakan rekapitulasi dan koordinasi terkait hasil pengawasan Inspektorat termasuk dalam penentuan ruang lingkup pada perhitungan formula;
2. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam menindaklanjuti temuan;
3. Melakukan rekapitulasi data tindak lanjut hasil rekomendasi Inspektorat.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.6	89.40	85.36	95.48	981.160.000	503.410.720	46.26

Dari sisi anggaran awalnya dialokasikan sebesar Rp981.160.000 untuk kegiatan pendukung seperti reviu anggaran, reviu laporan keuangan, reviu perencanaan kebutuhan barang milik negara, penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan serta penyelenggaraan pemantauan, pembinaan, dan pendampingan. Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan optimal meskipun adanya *refocusing* anggaran yang tersedia

menjadi sebesar Rp504.136.000 dan realisasi anggaran Rp503.410.720 sehingga efisiensi sumber daya diperoleh 46.26%.

IKK.7. Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	4	4	4	4	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu mendorong tingkat ketercapaian tujuan, menciptakan budaya pengawasan, dan mendeteksi sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Ruang lingkup mencakup kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKN pada Tahun 2025, yang meliputi:

1. Melakukan monitoring atas Tindak Lanjut AoI hasil penilaian Evaluasi SPIP BPKP;
2. Melaksanakan pendampingan Penilaian Mandiri Evaluasi SPIP di satker;

3. Melaksanakan Penjaminan Kualitas dari Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SPIP seluruh satker.

Adapun hasil pelaksanaan pendampingan dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKN sebagai upaya peningkatan nilai indeks Maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindak Lanjut AoI Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024;
2. Rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan SPIP Tahun 2025 dengan tim Penilaian Mandiri dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada tanggal 11 April 2025;
3. Mengikuti Bimbingan Teknis dan Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP tanggal 5 Juni 2025;
4. Melaksanakan Pendampingan dalam Kegiatan Rapat Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri dan pengisian Kertas Kerja Penjaminan Kualitas yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni s.d 30 Juli 2025;
5. Rapat koordinasi Pembahasan Monitoring Tindak Lanjut AoI Evaluasi SPIP 2024 dengan tim Penilaian Mandiri dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada tanggal 9 Juli 2025;
6. Menyampaikan Surat No: 11573/B-OT.06/SD/A/2025 Tanggal 10 Juli 2025 perihal Permohonan Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKN;
7. Rapat Monitoring Tindak Lanjut AOI Evaluasi SPIP Tahun 2025 secara Daring bersama Tim Penilaian Mandiri dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Tim Evaluator dari BPKP pada tanggal 15 Juli 2025;
8. Melakukan penjaminan kualitas atas Laporan Penilaian Mandiri satker dengan mengeluarkan Pernyataan Telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri

Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada BKN Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025;

9. Rapat Evaluasi Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bersama Tim Penilaian Mandiri dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Tim Evaluator dari BPKP pada tanggal 12 Agustus 2025;
10. Menerima Draf Surat No: PE.09.02/S- /D205/2/2025 Tgl Oktober 2025 tentang Notisi Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 yang berisikan nilai hasil Evaluasi SPIP sementara sebesar SPIP 3,522; MRI 3,559; IEPK 3,072;
11. Melakukan tanggapan dari Draft Surat Penyampaian Notisi dengan melaksanakan rapat koordinasi tgl 21 Oktober 2025 dengan Tim Penjaminan Kualitas, Tim Penilaian Mandiri, dan Tim Evaluator BPKP yang membahas tentang sanggahan atas nilai notisi serta membahas kesepakatan hasil akhir atas Skor Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BKN TA 2025;
12. Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 20- 21 November 2025;
13. Menerima Surat No: PE.09.02/SP-124/D2/05/2025 Tgl 12 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025;

Gambar. 4 Internalisasi Penyelenggaraan SPIP



Berdasarkan surat [Permohonan Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKN](#) yang disampaikan ke BPKP pada tanggal 10 Juli 2025 serta [Surat Pernyataan](#) Telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Badan Kepegawaian Negara yang disampaikan oleh tim Penjamin Kualitas pada tanggal 17 Juli 2025 diperoleh simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024/2025 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terukur dan terkelola” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,299”. Sehingga capaian kinerja IKK.7 tahun 2025 yaitu 100% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 4 dan realisasi kinerja yang diperoleh berada level 4 demikian juga dalam capaian jangka menengah diperoleh 100%.

Namun demikian berdasarkan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 yang disampaikan oleh BPKP bahwa nilai SPIP sebesar 3,533 atau berada pada level 3. Hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu:

1. Masih terdapat AoI Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara TA 2024 yang belum ditindaklanjuti;

2. Penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya efektif diterapkan, hal ini dapat dilihat dari satker yang melaksanakan Penilaian Mandiri masih belum sepenuhnya seluruh satker serta masih sebatas dokumentasi saja disebabkan kurangnya komitmen tentang penyelenggaraan Maturitas SPIP;
3. Sebagian belum terdapat dokumentasi evaluasi dan perbaikan atas unsur penilaian SPIP.

Rekomendasi dan perbaikan yang akan dilakukan dalam peningkatan indeks maturitas SPIP di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaitu:

- a. Tim Penjamin Kualitas melakukan pendampingan penilaian mandiri atas evaluasi SPIP 2025-2026 kepada satker maupun tim penilai mandiri;
- b. Menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP 2025 berkoordinasi dengan Tim Penilai Mandiri.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKK.7 dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan capaian kinerja 100%. Dari sisi anggaran awalnya dialokasikan sebesar Rp139.620.000 untuk Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN, Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko, serta Internalisasi Penyelenggaraan SPIP, kegiatan pendukung tersebut dapat terlaksana dengan optimal meskipun adanya *refocusing* anggaran yang tersedia menjadi sebesar Rp122.685.309 sehingga efisiensi sumber daya diperoleh 12.13%.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.7	4	4	100	139.620.000	122.685.309	12.13

IKK.8. Level Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	2	n/a	n/a	n/a	n/a	66.67	66.67

Dalam upaya mempertahankan ataupun meningkatkan level kapabilitas APIP, perlu terus menerus melaksanakan dan menginternalisasi dengan baik seluruh infrastruktur yang didukung dengan pemenuhan kapabilitas APIP secara berkesinambungan termasuk melakukan peran dan layanan dalam rangka mencegah, menangkal dan mendeteksi tindak penyimpangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan surat dari BPKP Nomor: [PE.09.03/LHP-195/D205/2/2023](#) tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Badan Kepegawaian Negara diperoleh kesimpulan hasil evaluasi bahwa Kapabilitas Inspektorat BKN pada tahun 2023 maupun 2024 telah berada pada **“Level 3”** dengan skor **“3,44”** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP dikarenakan tim kapabilitas APIP tidak memperoleh jadwal evaluasi oleh tim evaluator BPKP di tahun 2024. Adapun realisasi tahun 2025 berdasarkan [Laporan Hasil Evaluasi](#) Kapabilitas APIP pada Inspektorat BKN Tahun 2025 pada tanggal 2025 menyimpulkan bahwa Inspektorat BKN berada pada **Level 2 dengan skor 2,48**. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat BKN telah mampu melaksanakan pengawasan (asurans dan konsultansi/advisory) dengan landasan struktur dan prosedur, tetapi kualitas serta konsistensi masih belum memadai. Sehingga capaian target 2025 sebesar 66.67% dan capaian jangka menengah 66.67% atau masih belum berhasil mencapai sesuai target yang ditetapkan.

Adapun hal yang telah dilakukan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah:

1. Telah menindaklanjuti *Area of Improvement (AoI)* setiap topik dalam 6 elemen kapabilitas yang tertuang dalam Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Badan Kepegawaian Negara;
2. Telah dilaksanakan Telaah Sejawat Intern pada tanggal 4 Juli 2025;
3. Telah menerbitkan Piagam Pengawasan Intern dan disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Adapun Piagam Pengawasan Intern dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Badan Kepegawaian Negara untuk mengevaluasi kegiatan APIP;
4. Telah melaksanakan *entry meeting* atas Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat BKN dengan menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan BPKP Nomor 6 tahun 2025 tanggal 28 November 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menggantikan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah.

Gambar 5. Entry Meeting APIP BKN dengan Tim Evaluator BPKP



Hambatan yang ditemui diantaranya yaitu terdapat perubahan metode penilaian yang dilakukan dengan peraturan yang berlaku sebelumnya berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 menjadi Peraturan BPKP Nomor 6 tahun 2025 tanggal 28 November 2025, maka rekomendasi yang akan dilakukan agar target dapat dicapai yaitu melakukan koordinasi dengan BPKP terkait dokumen pendukung pada setiap aspek AoI yang harus dilengkapi pada penilaian tahun selanjutnya serta menindaklanjuti AoI atas hasil evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025 dengan melengkapi bukti dukung yang diperlukan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKK.8 dapat dilihat pada tabel di bawah, Dari sisi anggaran awalnya dialokasikan sebesar Rp53.720.000 untuk Internalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, Workshop dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal, serta Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat namun dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang tersedia menjadi sebesar Rp20.982.000 dimana anggaran tersebut telah dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Inspektorat sehingga dari sisi anggaran diperoleh efisiensi sebesar 41.41%

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.8	3	2	66.67	53.720.000	20.982.000	41.41%

IKK. 9. Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di inspektorat	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00	100.00

Pada IKK.9 unit kerja diharapkan mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan.

Inspektorat dalam rangka mendukung percepatan program prioritas nasional yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme maka melakukan penguatan pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan nasional yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan penyelenggaraan manajemen risiko agar disesuaikan dengan Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 dan penetapan kategori risiko korupsi dalam pedoman. Adapun inovasi yang menjadi target Inspektorat pada tahun 2025 adalah penyampaian usulan draf Keputusan Kepala terkait pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN

atas dasar evaluasi Kebijakan Keputusan Kepala 326.1 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN.

Telah disampaikan [Nota Dinas](#) kepada Ketua Komite Manajemen Risiko terkait hasil evaluasi atas Keputusan Kepala BKN Nomor 326.1 tentang pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN pada 25 Agustus 2025 serta telah disampaikan [Nota Dinas](#) Permohonan Telaah Usulan Draft Perbaikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 326.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara kepada Biro Hukum dan Komunikasi Publik pada 29 Desember 2025.

Adapun IKK 9 termasuk IKK yang baru muncul di triwulan III tahun 2025 setelah terdapat penyesuaian PK Inspektorat. Sehingga capaian pada Triwulan I - II tidak dapat dihitung atau diperbandingkan dengan capaian pada Triwulan III – IV Tahun 2025. Sehingga realisasi paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di inspektorat sesuai dengan formula yang ditetapkan pada manual IKK yaitu:

Formula:

Jumlah paket inovasi = total paket inovasi yang dihasilkan di lingkungan Inspektorat BKN

Inspektorat berhasil merealisasikan 1 paket inovasi pada tahun 2025 dengan capaian 100% dan capaian jangka menengah 100%. IKK ini merupakan IKK yang baru muncul pada tahun 2025 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yaitu tim Manajemen Risiko BKN berkoordinasi serta melakukan penelaahan draf Keputusan Kepala bersama dengan tim kerja lainnya di Inspektorat agar pedoman yang disusun selaras dengan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN. Adapun rekomendasi dalam mempertahankan capaian IKK sesuai target yang ditetapkan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi atau

saran perbaikan atas hasil evaluasi kebijakan tersebut serta senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan pada unit kerja terkait inovasi yang diperlukan dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan internal di BKN.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKK.9 dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan capaian kinerja 100% tidak terdapat pagu anggaran maupun realisasi anggaran sehingga efisiensi sumber daya berada pada nilai 0%.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.9	1	1	100	0	0	0

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN

IKK.10. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat	99	99	99	99	99	99.89	n/a	n/a	n/a	n/a	100.90	100.90

Inspektorat didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.350.000.000** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan [Petunjuk Operasional Kegiatan \(POK\) Inspektorat Tahun 2025 \(cetakan ke-5\)](#) tanggal 31 Oktober 2025 yang kemudian setelah *refocusing* anggaran pada tahun 2025 Inspektorat memiliki pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp697.816.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk dipergunakan secara optimal dalam mendukung seluruh kegiatan pendukung yang telah direncanakan.

Dari anggaran tersedia sebesar Rp697.816.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) hingga 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp697.067.841,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) pada persentase realisasi 99.89% dengan sisa anggaran Rp748.159,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau 0.11%. Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan internalisasi peraturan, serta transportasi lokal.

Sehingga persentase realisasi penyerapan anggaran di lingkungan Inspektorat sesuai dengan formula yang ditetapkan pada manual IKK yaitu:

Formula:

Membandingkan antara jumlah serapan anggaran di Inspektorat dengan jumlah pagu anggaran Inspektorat

$$N = A/B \times 100\%$$

N = Persentase realisasi penyerapan anggaran di lingkungan Inspektorat

A = Jumlah serapan anggaran di lingkungan Inspektorat

B = Jumlah pagu anggaran di lingkungan Inspektorat

$$N = \text{Rp}697.067.841 / \text{Rp}697.816.000 \times 100\% = 99.89\%$$

Inspektorat berhasil mencapai realisasi 99.89% dimana lebih tinggi 0.89% dari target yang ditetapkan yaitu 99% dengan persentase capaian tahunan 100.90% dan capaian jangka menengah 100.90%. Meski demikian dibandingkan realisasi anggaran tahun 2024 pada 99.92% terdapat penurunan realisasi anggaran tahun menjadi 99.89 (turun 0,03%). Upaya yang telah dilaksanakan yaitu Subbagian Tata Usaha khususnya pengelola anggaran melakukan monitoring secara berkala penggunaan

anggaran serta menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target realisasi anggaran yakni kurangnya komunikasi antara pengelola anggaran, pimpinan dan auditor yang melaksanakan pemanfaatan anggaran. Sehingga rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan keuangan secara berkala dengan pegawai Inspektorat.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKK.10 dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan capaian kinerja 100.90% tidak terdapat pagu anggaran maupun realisasi anggaran sehingga efisiensi sumber daya berada pada nilai 0%.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.10	99	99.89	100.90	0	0	0

IKK.11. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan di lingkungan Inspektorat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi					Persen Capaian 2025	Capaian Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di lingkungan Inspektorat	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00	100.00

Inspektorat memiliki anggaran sebesar Rp1.350.000.000 untuk tahun 2025. Anggaran tersebut dikenakan efisiensi sebesar Rp652.184.000, sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp697.816.000. Inspektorat berhasil merealisasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp697.067.841 atau 99,89% dari total anggaran yang tersedia. Anggaran ini direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, jamuan rapat, dan honorarium narasumber.

Pelaksanaan anggaran dan kegiatan Inspektorat untuk tahun 2025 belum dilakukan audit baik oleh Inspektorat maupun BPK. Dengan demikian, belum terdapat temuan audit pada tahun 2025. Meski begitu, pada tahun-tahun sebelumnya Inspektorat selalu menyediakan dokumen pertanggungjawaban anggaran secara lengkap kepada auditor BPK. Pada pemeriksaan tahun 2025, BPK tidak menemukan temuan atas pelaksanaan anggaran Inspektorat tahun 2024. Selain itu, pada akhir tahun 2024, Inspektorat tidak memiliki rekomendasi temuan audit yang belum ditindaklanjuti.

Sehingga Inspektorat tidak memiliki rekomendasi temuan hasil audit yang masih perlu ditindaklanjuti. Pemeriksaan BPK pada tahun 2025 atas anggaran Inspektorat tahun 2024 tidak menghasilkan temuan audit yang perlu ditindaklanjuti. Anggaran Inspektorat tahun 2025 belum dilakukan audit baik oleh BPK maupun Inspektorat. Sehingga rasio temuan hasil audit/temuan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat adalah 0 (nol) sesuai dengan formula yang ditetapkan pada manual IKK yaitu:

Formula:

Membandingkan jumlah temuan dengan jumlah kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat

$$N = A/B \times 100\%$$

N = Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2025 di lingkungan Inspektorat

A = Jumlah temuan Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2025

B = Jumlah kegiatan tahun 2025 yang diaudit oleh BPK/Inspektorat atas Inspektorat

$$N = 0/0 \times 100\% = 0$$

Inspektorat berhasil mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu 0 dengan capaian 100% dan capaian jangka menengah 100%. IKK ini merupakan IKK yang baru muncul pada tahun 2025 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan yakni pengelola anggaran berkoordinasi dengan seluruh pegawai dalam melengkapi dokumen pertanggungjawaban agar tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memperkecil peluang kesalahan pada dokumen pertanggungjawaban. Kendala yang ditemui masih kurangnya komunikasi antara pengelola anggaran dengan pegawai dalam melaksanakan pemanfaatan anggaran. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja secara berkala serta menyusun laporan rasio temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat pada akhir tahun.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKK.11 dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan capaian kinerja 100% tidak terdapat pagu anggaran maupun realisasi anggaran sehingga efisiensi sumber daya berada pada nilai 0%.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK.11	0	0	100	0	0	0

3.3. Capaian Anggaran

Inspektorat didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.350.000.000** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan [Petunjuk Operasional Kegiatan \(POK\) Inspektorat Tahun 2025 \(cetakan ke-5\)](#) tanggal 31 Oktober 2025 yang kemudian setelah *refocusing* anggaran pada tahun 2025 Inspektorat memiliki pagu anggaran sebesar Rp697.816.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk dipergunakan secara optimal dalam mendukung seluruh kegiatan pendukung yang telah direncanakan.

Dari anggaran tersedia sebesar Rp697.816.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) hingga 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp697.067.841,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) pada persentase realisasi 99.89% dengan sisa anggaran Rp748.159,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau 0.11%. Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan internalisasi peraturan, serta transportasi lokal.

Berikut pagu dan realisasi anggaran Inspektorat tahun 2025:

Tabel. 12
Rencana dan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2025

Program Kegiatan (Output dan Rincian Kegiatan)	Pagu Anggaran	Pagu Setelah Refocusing	Realisasi Tahun 2025 (SP2D)	Persentase %
Program Dukungan Manajemen	Rp1.350.000.000	Rp697.816.00	Rp697.067.841	99.89 %
Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp1.350.000.000	Rp697.816.00	Rp697.067.841	99.89 %
Layanan Reformasi Kinerja	Rp175.500.000	Rp50.000.000	Rp49.989.812	99.98 %

Program Kegiatan (Output dan Rincian Kegiatan)	Pagu Anggaran	Pagu Setelah Refocusing	Realisasi Tahun 2025 (SP2D)	Persentase %
a. Koordinasi dan Internalisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi	Rp43.477.000	Rp50.000.000	Rp49.989.812	99.98 %
Layanan Audit Internal	Rp1.174.500.000	Rp647.816.000	Rp647.078.029	99.89 %
a. Reviu Anggaran	Rp6.075.000	Rp770.000	Rp768.000	99.74 %
b. Reviu Laporan Keuangan	Rp6.075.000	Rp313.000	Rp312.000	99.68 %
c. Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	Rp6.075.000	Rp1.099.000	Rp1.097.600	99.87 %
d. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	Rp735.213.000	Rp420.402.000	Rp420.380.300	99.99 %
e. Penyelenggaraan pemantauam, pembinaan, dan pendampingan	Rp227.722.000	Rp81.552.000	Rp80.852.820	99.14 %
f. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Rp19.440.000	Rp1.620.000	Rp1.620.000	100.00 %
g. Internalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM)	Rp6.480.000	0	0	100.00 %
h. Internalisasi Pengendalian Gratifikasi	Rp8.100.000	Rp1.620.000	Rp1.620.000	100.00 %
i. Internalisasi Penyelenggaraan SPIP	Rp112.080.000	Rp119.458.000	Rp119.445.309	99.99 %
j. Workshop dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal	Rp8.640.000	0	0	100.00 %
k. Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat	Rp33.000.000	Rp20.982.000	Rp20.982.000	100.00 %

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran utama yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Inspektorat BKN ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, di samping juga dapat dipergunakan sebagai alat pengendali manajemen yang handal untuk melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing pegawai di lingkungan Inspektorat BKN.

Laporan kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja baik bagi unit kerja di lingkungan BKN, maupun pembaca dan juga sebagai bahan untuk perbaikan pencapaian Kinerja pada tahun berikutnya di lingkup Inspektorat.

4.1. Kesimpulan

Dengan berdasarkan pada uraian dan pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Kinerja Inspektorat BKN, maka pada garis besarnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam mendukung tercapainya visi dan misi BKN, Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan internal melalui Audit, Reviu, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya terhadap kinerja dan anggaran di lingkungan BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN serta Pusat Pengembangan SDM;

2. Pada tahun 2025, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang disampaikan dalam rencana aksi maupun PKPT Tahun 2025 dari anggaran tersedia sebesar Rp697.816.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) hingga 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp697.067.841,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) pada persentase realisasi 99.89% dengan sisa anggaran Rp748.159,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau 0.11%. Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta transportasi lokal;
3. Dalam pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Badan Kepegawaian Negara telah sesuai dengan kode etik dan standar Audit yang berdasarkan pada peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

4.2. Rekomendasi/Saran

Dalam upaya mempertahankan maupun menyempurnakan kinerja yang telah dicapai sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2025, maka perlu untuk dilakukan peningkatan kapabilitas APIP dalam melaksanakan tugas pokok Inspektorat melalui peningkatan kompetensi baik berupa *workshop*, pelatihan, maupun pengiriman diklat bagi auditor. Selain itu senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam pelaksanaan pengawasan internal sebagai upaya mencapai visi dan misi BKN.

Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja 2025;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan 2025 cetakan kelima;
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan 2025.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Herdi
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zudan Arif Fakrulloh
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Juli 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Zudan Arif Fakrulloh
NIP. 196908241999031001

Pihak Pertama
Inspektur

Dedi Herdi
NIP. 196511041992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK.1	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87
		IKK.2	Skor Evaluasi AKIP Inspektorat	73
		IKK.3	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat	100
		IKK.4	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Inspektorat	90
SK.2	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah	IKK.5	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Inspektorat	100
SK.3	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN	IKK.6	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang di tindaklanjuti	89.4
		IKK.7	Hasil penilaian penjamin kualitas level maturitas SPIP BKN	4
		IKK.8	Level Kapabilitas APIP	3
		IKK.9	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat	1
SK.4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.10	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat	99
		IKK.11	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat	0

Kode KRO	Kegiatan	Pagu Alokasi
3635	Pengelolaan Risiko, Pengenalan, dan Pengawasan Internal	Rp1.250.000.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	
961	Layanan Reformasi Kinerja	Rp175.500.000
965	Layanan Audit Internal	Rp1.074.500.000
TOTAL PAGU		Rp1.250.000.000

Jakarta, 29 Juli 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Kepegawaian Negara



Zudan Arif Fakrulloh
NIP. 196908241999031001

Pihak Pertama
Inspektur



Dedi Herdi
NIP. 196511041992031001

POK INSPEKTORAT TA 2025 (CETAKAN KE-5)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(088)

(01)

(017220)

Rp. 1,350,000,000

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Badan Kepegawaian Negara

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen			1,350,000,000	
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			1,350,000,000	
3635.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	52.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,350,000,000	

3635.EBD.961	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
052	Layanan Reformasi Kinerja	2.0 Dokumen		175,500,000	
A	Pelaksanaan			175,500,000	U
	Koordinasi dan Internalisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi			175,500,000	
521211	Belanja Bahan			24,300,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [30 ORG x 10 KEG]	300.0 OK	57,000	17,100,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [30 ORG x 10 KL]	300.0 OK	24,000	7,200,000	*
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	*
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			145,800,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Reformasi Kinerja [1 PKT]	1.0 PKT	145,800,000	145,800,000	*
3635.EBD.965	Layanan Audit Internal	50.0 Dokumen		1,174,500,000	
052	Pelaksanaan			1,174,500,000	U
A	Reviu Anggaran			6,075,000	
521211	Belanja Bahan			6,075,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	57,000	4,275,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	24,000	1,800,000	*
B	Reviu Laporan Keuangan			6,075,000	
521211	Belanja Bahan			6,075,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	57,000	4,275,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	24,000	1,800,000	*
C	Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara			6,075,000	
521211	Belanja Bahan			6,075,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	57,000	4,275,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	24,000	1,800,000	*
D	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan			735,213,000	

POK INSPEKTORAT TA 2025 (CETAKAN KE-5)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(088)

(01)

(017220)

Rp. 1,350,000,000

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Badan Kepegawaian Negara

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
E	521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)		33,375,000	A	RM
		- Biaya Makan Rapat Biasa [25 ORG x 15 KEG]	375.0 OK	57,000	21,375,000	*
		- Biaya Snack Rapat Biasa [25 ORG x 20 KEG]	500.0 OK	24,000	12,000,000	*
	524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)		688,208,000	A	RM
		- Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan dan Pengawasan [1 PKT]	1.0 PKT	688,208,000	688,208,000	*
	524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)		13,630,000	A	RM
		- Uang Transport Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota [3 ORG x 13 KEG]	39.0 OK	170,000	6,630,000	*
		- Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 PKT]	1.0 PKT	7,000,000	7,000,000	*
		<i>Penyelenggaraan Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan</i>		227,722,000		
	521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)		12,525,000		RM
		- Biaya Makan Rapat Biasa [25 ORG x 5 KEG]	125.0 OK	57,000	7,125,000	
		- Biaya Snack Rapat Biasa [25 ORG x 9 KEG]	225.0 OK	24,000	5,400,000	
	524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)		215,197,000	A	RM
		- Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan dan Pembinaan [1 PKT]	1.0 PKT	215,197,000	215,197,000	*
		<i>Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko</i>		19,440,000		
	F	521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)		19,440,000	A
		- Biaya Makan Rapat Biasa [30 ORG x 8 KEG]	240.0 OK	57,000	13,680,000	*
		- Biaya Snack Rapat Biasa [30 ORG x 8 KEG]	240.0 OK	24,000	5,760,000	*
		<i>Internalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM)</i>		12,080,000		
521211		<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)		6,480,000	A	RM
		- Biaya Makan Rapat Biasa [40 ORG x 2 KEG]	80.0 OK	57,000	4,560,000	*
		- Biaya Snack Rapat Biasa [40 ORG x 2 KEG]	80.0 OK	24,000	1,920,000	*
522151		<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)		5,600,000	A	RM
		- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	*
		- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke Bawah) [2 ORG x 2 JAM]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	*
H		<i>Internalisasi Pengendalian Gratifikasi</i>		8,100,000		
	521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)		8,100,000	A	RM
		- Biaya Makan Rapat Biasa [100 ORG x 1 KEG]	100.0 OK	57,000	5,700,000	*
		- Biaya Snack Rapat Biasa [100 ORG x 1 KEG]	100.0 OK	24,000	2,400,000	*

POK INSPEKTORAT TA 2025 (CETAKAN KE-5)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(088)
(01)
(017220)
Rp. 1,350,000,000

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Badan Kepegawaian Negara
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I 521211	Internalisasi Penyelenggaraan SPIP			112,080,000	
	Belanja Bahan			25,620,000	A
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [110 ORG x 2 KEG]	220.0 OK	54,000	11,880,000	
	- Biaya Snack Rapat Biasa [110 ORG x 3 KEG]	330.0 OK	22,000	7,260,000	
	> Pelaksanaan Bimtek SPIP			6,480,000	
	>> Pelaksanaan Bimtek SPIP		0	6,480,000	
	- Biaya Makan Rapat Biasa [20 ORG x 4 KEG]	80.0 OK	57,000	4,560,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [20 ORG x 4 KEG]	80.0 OK	24,000	1,920,000	*
	522151 Belanja Jasa Profesi			11,200,000	A
524111	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke Bawah) [2 ORG x 2 JAM]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	*
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke Bawah) [2 ORG x 2 JAM]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	*
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa			75,260,000	
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis SPIP [1 PKT]	1.0 PKT	75,260,000	75,260,000	
	J Workshop dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal			8,640,000	
	521211 Belanja Bahan			3,240,000	A
522151	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [40 ORG x 1 KEG]	40.0 OK	57,000	2,280,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [40 ORG x 1 KEG]	40.0 OK	24,000	960,000	*
	522151 Belanja Jasa Profesi			5,400,000	A
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke Bawah) [3 ORG x 2 JAM]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	*
	K Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat			33,000,000	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa			33,000,000	
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan	1.0 PKT	33,000,000	33,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Jakarta Timur, 31 Oktober 2025

Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Audit 2025 Inspektorat Badan Kepegawaian Negara																										
Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran								Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran									
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
1	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Riyantie Ari R. Dyah, Akhmar, Esra, Melly, Syafria, Irma, Jonathan, Vivi, Renaldi, Desi, Farida	Dalnis Ketua Tim Anggota	6,075,000	1 Laporan	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2024	Mandatory	6 Januari 2025	7 Maret 2025	Riyantie Ari R. Dyah, Akhmar, Esra, Melly, Syafria, Irma, Jonathan, Vivi, Renaldi, Desi, Farida, Ismi, Margo	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	1 Laporan		Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Riyantie Ari R. Dyah, Akhmar, Esra, Melly, Syafria, Irma, Jonathan, Vivi, Renaldi, Desi, Farida, Ismi, Margo	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	1 Laporan	
2	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Fita R. Arie P. Ayu, Hoven, Citra, Bayu, Angga, Linda, Pandu, Zahwa,	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2024	Mandatory	6 Januari 2025	7 Maret 2025	Fita R. Arie P. Ayu, Hoven, Citra, Bayu, Angga, Linda, Pandu, Zahwa, Okdi, Reni	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Fita R. Arie P. Rahayu, Hoven, Citra, Bayu, Angga, Nurlinda, Pandu, Zahwa, Okdi, Reni	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Arniz Novita Fitri D, Rina, Almira, Biayu, Fathur, Ria Okta	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2024	Mandatory	6 Januari 2025	7 Maret 2025	Arniz Novita Fitri D, Rina, Almira, Biayu, Fathur, Ria Okta, Fandi	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Arniz Novita Fitri D., Rina, Almira, Biayu, Fathur, Ria Okta, Fandy	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
4	Audit Operasional Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Periode April-Desember TA 2024	Tinggi	3 Maret 2025	16 Mei 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar	Dalnis Ketua Tim Anggota	568,133,000	1 Laporan	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	1 Laporan	Audit Operasional TA 2024 tidak dapat dilaksanakan karena Dokumen Pertanggungjawaban untuk seluruh Kantor Regional sudah di minta oleh BPK dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan BKN TA 2024.	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	3 Laporan	Audit Operasional TA 2024 tidak dapat dilaksanakan karena Dokumen Pertanggungjawaban untuk seluruh Kantor Regional sudah di minta oleh BPK dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan BKN TA 2024
5	Audit Operasional Kantor Regional IV BKN Makassar Periode April - Desember TA 2024	Tinggi	3 Maret 2025	16 Mei 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Riyantie Syafria/Rina Rina/Syafria, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		4 Laporan	
6	Audit Operasional Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Periode April-Desember TA 2024	Tinggi	3 Maret 2025	16 Mei 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, dan Deputi Sinka TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, dan Deputi Sinka TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandy, Irma, Zahwa	Dalnis Ketua Tim Anggota		3 Laporan	

[illegible]

Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran									Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran								
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
16	Reviu LK Semester I TA 2025	Mandatory	30 Juni 2025	29 Agustus 2025	Riyantie Fita Ari Rahma, Rina, Akhmar, Fitri D, Hoven, Okdi, Desi, Ismi, Almira, Rey, Margo, Dyah, Citra, Linda, Zahwa, Fathur	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Reviu LK Semester I TA 2025	Mandatory	30 Juni 2025	29 Agustus 2025	Riyantie Fita Ari Rahma, Rina, Akhmar, Fitri D, Hoven, Okdi, Desi, Ismi, Almira, Rey, Margo, Dyah, Citra, Linda, Zahwa, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Reviu LK Semester I TA 2025	Mandatory	30 Juni 2025	29 Agustus 2025	Riyantie Fita R. Ari Rahma, Dyah, Rina, Akhmar, Okdi, Desi, Ismi, Almira, Renaldi, Margo, Citra, Linda, Zahwa, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	A.n Fitri Dwijayanti cuti besar A.n Mar'an Hoven alih jabatan dan mutasi
17	Reviu RKA KL TA 2026	Mandatory	30 Juni 2025	28 November 2025	Amiz Novita Melly Arie P, Ayu, Irma, Esra, Farida, Ria Okta, Fandi, Pandu, Sya fria, Angga, Vivi, Jonathan	Dalnis KT 1 KT 2 AT	6,075,000	1 Laporan	Reviu RKA KL TA 2026	Mandatory	30 Juni 2025	28 November 2025	Amiz Novita Melly Arie P, Ayu, Irma, Esra, Farida, Ria Okta, Fandi, Pandu, Sya fria, Angga, Vivi, Jonathan, Biayu, Reni, Bayu	Dalnis KT 1 KT 2 Anggota	0	1 Laporan		Reviu RKA KL TA 2026	Mandatory	30 Juni 2025	28 November 2025	Amiz Novita Melly Nurlinda, Rahayu, Irma, Esra, Farida, Ria Okta, Fandy, Pandu, Sya fria, Angga, Vivi, Jonathan, Biayu, Reni, Bayu	Dalnis Ketua Tim 1 & 2 Anggota	0	1 Laporan	
18	Reviu LK TWIII TA 2025	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Riyantie Fita Akhmar, Rina, Fitri D, Okdi, Desi, Rey, Fathur	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Reviu LK TWIII TA 2025	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Riyantie Fita Akhmar, Rina, Fitri D, Okdi, Desi, Rey, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Reviu LK Triwulan III TA 2025	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Riyantie Fita R. Akhmar, Rina, Fitri D., Okdi, Desi, Renaldi, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
19	Reviu RKBMN TA 2027	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Ari Rahma Hoven Dyah, Margo, Mira, Zahwa, Citra, Ismi, Linda	Dalnis KT Anggota	6,075,000	1 Laporan	Reviu RKBMN TA 2027	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Ari Rahma Hoven Dyah, Margo, Mira, Zahwa, Citra, Ismi, Linda	Dalnis KT Anggota	0	1 Laporan		Reviu RKBMN TA 2027	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Ari Rahma Margo Dyah, Mira, Zahwa, Citra, Ismi	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi
20	Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal dan Puspenkom	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal dan Puspenkom	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, dan Puspenkom	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar,	Dalnis Ketua Tim Anggota		4 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan evaluasi karena adanya perubahan SOTK dan kesiapan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
21	Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Riyantie Syafria/Rina Rina/Syafria, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Riyantie Syafria/Rina Rina/Syafria, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		4 Laporan	

Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran									Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran								
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
22	Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Deputi Sinka dan Sekretariat BP ASN	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Deputi Sinka dan Sekretariat BP ASN	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, dan Sekretariat BP ASN	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Ari Rahma Okdi, Fandi, Irma, Zahwa	Ketua Tim Anggota		4 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan evaluasi karena adanya perubahan SOTK dan kesiapan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan A.n Hoven alih jabatan dan mutasi
23	Evaluasi AKIP Kantor Regional VII BKN Palembang, Kantor Regional XI BKN Manado, Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan PPSS	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Arniz Arie P Margo, Reni, Ria Okta, Ayu,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional VII BKN Palembang, Kantor Regional XI BKN Manado, Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan PPSS	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Arniz Arie P Margo, Reni, Ria Okta, Ayu,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional VII BKN Palembang, Kantor Regional XI BKN Manado, Kantor Regional XIV BKN Manokwari , dan Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Arniz Margo, Reni, Ria Okta, Rahayu	Ketua Tim Anggota		4 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan evaluasi karena adanya perubahan SOTK dan kesiapan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan A.n Arie Puspiniti promosi jabatan
24	Evaluasi AKIP Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional VI BKN Medan, Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Fita R Fitri D/Vivi Vivi/Fitri D, Almira, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional VI BKN Medan, Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Fita R Fitri D/Vivi Vivi/Fitri D, Almira, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional VI BKN Medan, Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Fita R. Vivi, Almira, Pandu, Bayu	Ketua Tim Anggota		4 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan evaluasi karena adanya perubahan SOTK dan kesiapan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
25	Evaluasi AKIP Kantor Regional II BKN Surabaya, Pusbangpeg ASN, Inspektorat dan Deputi PMK	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Rey	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional II BKN Surabaya, Pusbangpeg ASN, Inspektorat dan Deputi PMK	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Rey	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional II BKN Surabaya, Pusbang SDM, Inspektorat dan Deputi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Renaldi	Dalnis Ketua Tim Anggota		4 Laporan	
26	Audit Operasional Dir. Wasdal 1 periode Jan-Sept 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar,	Dalnis KT Anggota		1 LHA									Tidak dapat dilaksanakan audit operasional pada Unit Kerja level JPT Pratama di Kantor Pusat karena adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan alokasi anggaran setiap unit kerja tersebut tidak ada.	Audit Operasional Kantor Regional IX BKN Jayapura	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Terdapat relaksasi blokir efisiensi anggaran sehingga dapat dilaksanakan audit operasional ke Kantor Regional yang mempunyai potensi risiko tinggi dalam pengelolaan anggaran BA BUN.
27	Audit Operasional Dit. Pensiun periode Januari s.d September 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis KT Anggota		1 LHA										Audit Operasional Kantor Regional IV BKN Makassar	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
28	Audit Operasional Dit. Inti Periode Januari s.d September 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis KT Anggota		1 LHA										Audit Operasional Kantor Regional III BKN Bandung	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Ari Rahma Okdi Fandy, Irma, Zahwa	Ketua Tim Anggota		1 Laporan	

Semula								Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran								Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran										
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
29	Audit Operasional PPSS Periode Januari s.d September 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Arniz Arie P Margo, Reni, Ria Okta, Ayu,	Dalnis KT Anggota		1 LHA									Tidak dapat dilaksanakan audit operasional pada Unit Kerja level JPT Pratama di Kantor Pusat karena adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan alokasi anggaran setiap unit kerja tersebut tidak ada.	Audit Operasional Kantor Regional XIV BKN Manokwari Periode Januari s.d Agustus 2025	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Arniz Margo Reni, Ria Okta, Rahayu	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Terdapat relaksasi blokir efisiensi anggaran sehingga dapat dilaksanakan audit operasional ke Kantor Regional yang mempunyai potensi risiko tinggi dalam pengelolaan anggaran BA BUN.
30	Audit Operasional Biro SDM Periode Januari s.d September 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Fita R Fitri D Vivi, Almira, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota		1 LHA										Audit Operasional Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh Periode Januari s.d Agustus 2025	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Fita R. Fitri D. Vivi, Almira, Pandu, Bayu	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
31	Audit Operasional Dit. Jabatan ASN periode Januari s.d September 2024	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Rey	Dalnis KT Anggota		1 LHA										Audit Operasional Pusbang SDM Periode Januari s.d Agustus 2025	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Renaldi	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
32	Penilaian Mandiri RB		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arie P Almira Ismi Farida Ayu Jonathan Bayu	Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil	320,000,000	1 Laporan	Penilaian Mandiri RB		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Arie P Almira Ayu Jonathan Bayu	Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil	0	1 Laporan		Penilaian Mandiri RB		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Almira Ismi Farida Rahayu Jonathan Bayu	Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil	0	1 Laporan	
33	Penilaian Mandiri ZI		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fitri D Angga Pandu Ismi Ria Okta Margo Budi Harvanto	Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Kasubhag TU		1 Laporan	Penilaian Mandiri ZI		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Fitri D Angga Pandu Ismi Ria Okta Margo Budi Harvanto	Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Kasubhag TU		1 Laporan		Penilaian Mandiri ZI		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fitri D. Angga Pandu Ismi Ria Okta Margo Budi	Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia TU		1 Laporan	
34	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Syafria Vivi Okdiani Renaldi Biayu Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Syafria Vivi Okdiani Renaldi Biayu Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan		Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Syafria Vivi Okdiani Renaldi Biayu Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan	
35	Pengawasan MRI		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Arie P Mar'an Hoven Okdiani Irma Ayu Citra Jonathan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan	Pengawasan MRI		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Arie P Mar'an Hoven Okdiani Irma Ayu Citra Jonathan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan		Pengawasan MRI		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Okdiani Irma Rahayu Citra Jonathan	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan	
36	PM Kapabilitas APIP		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Rina Esra Almira Bayu Zahwa Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan	PM Kapabilitas APIP		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Rina Esra Almira Bayu Zahwa Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan		PM Kapabilitas APIP		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Rina Esra Almira Bayu Zahwa Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan	
37	RB Inspektorat 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Angga Vivi Nurlinda Biayu Budi Farhan Friska	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU TU		1 Laporan	RB Inspektorat 2025		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Angga Vivi Nurlinda Biayu Budi Farhan Friska	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU TU		1 Laporan		RB Inspektorat 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Angga Vivi Nurlinda Biayu Budi Farhan Friska	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU TU		1 Laporan	
38	LHKASN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Angga Margo Reni	Auditor muda Auditor Penyelia Auditor Pertama		1 Laporan	LHKASN		2 Januari 2025	April 2025	Angga Margo Reni	Auditor muda Auditor Penyelia Auditor Pertama		1 Laporan		LHKASN		02 Januari 2025	April 2025	Angga Margo Reni	Auditor muda Auditor Penyelia Auditor Pertama		1 Laporan	
39	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Ari Rahma Pandu Citra Bayu	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Ari Rahma Pandu Citra Bayu	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan		BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Ari Rahma Pandu Citra Bayu	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan	

Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran									Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran								
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
40	Reviu PAPBJ		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Linda Esra Irma Fandi Akhmar	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir		1 Laporan	Reviu PAPBJ		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Linda Esra Irma Fandi Akhmar	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir		1 Laporan		Pendampingan Evaluasi Tata Kelola PBJ		01 Maret 2025	31 Desember 2025	Fita R. Nurlinda Esra Irma Fandy Akhmar Fathur	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir		1 Laporan	Berdasarkan Surat Tugas BPKP, tidak dilaksanakan reviu namun diganti dengan evaluasi tata kelola PBJ
41	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Arniz Melly Rina Vivi Citra Akhmar Pandu Irma Zahwa	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2025		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Arniz Melly Rina Vivi Citra Akhmar Pandu Irma Zahwa	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan		Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Arniz Melly Rina Vivi Citra Akhmar Pandu Irma Zahwa	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan	
42	WBS, Pengaduan dan Disiplin Pegawai		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Fitri Hoven Fandi Ismi Farhan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama TU		1 Laporan	WBS, Pengaduan dan Disiplin Pegawai		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Fitri Hoven Fandi I smi Farhan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama TU		1 Laporan		WBS, Pengaduan dan Disiplin Pegawai		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Fitri Fandy Ismi Farhan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama TU		1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi
43	Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Syafria Esra Reni Ria Okta	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan	Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Syafria Esra Reni Ria Okta	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Syafria Esra Reni Ria Okta	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	
44	Tim UPR Inspektorat		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Melly Rina Linda Margo Rey Budi Haryanto Farhan Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pertama TU TU TU		1 Laporan	Tim UPR Inspektorat		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Melly Rina Linda Margo Rey Dian Budi Farhan Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pertama TU TU TU TU		1 Laporan		Tim UPR Inspektorat		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Melly Rina Nurlinda Margo Renaldi Dian Budi Farhan Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pertama TU TU TU TU		1 Laporan	
45	Tim P3DN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ria Akhmar Jonathan Fathur Desi	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama		1 Laporan	Tim P3DN		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Ria Akhmar Jonathan Fathur Desi	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama		1 Laporan		Tim P3DN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Akhmar Jonathan Fathur Desi	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama		1 Laporan	
46	Tim Pemantauan Tindakanlntut Rekomendasi Inspektorat		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Almira Fathur Zahwa Okdi Desi	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	Tim Pemantauan Tindakanlntut Rekomendasi Inspektorat		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Almira Fathur Zahwa Okdi Desi	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		Tim Pemantauan Tindakanlntut Rekomendasi Inspektorat		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Almira Fathur Zahwa Okdi Desi	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	
47	SPI KPK		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Melly Angga Rey Biayu Farida Reni	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	SPI KPK		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Melly Angga Rey Biayu Farida Reni	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		SPI KPK		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita R. Melly Angga Renaldi Biayu Farida Reni	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	
48	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Arie P Rahayu Syafria Farida	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Arie P Rahayu Syafria Farida	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Rahayu Syafria Farida	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	An. Arie P promosi jabatan
49	Revisi POK Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Seluruh Auditor			1 Laporan	Revisi POK Tahun 2025		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Seluruh Auditor			1 Laporan		Revisi POK Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Fitri D. Anggota Tim sesuai Tim Reviu RKA KL TA 2025	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi An. Arie P promosi jabatan
50	Revisi RKBMN Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Hoven Anggota Tim sesuai Tim Reviu RKBMN TA 2025	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Revisi RKBMN Tahun 2025		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Hoven Anggota Tim sesuai Tim Reviu RKBMN TA 2025	Dalnis KT Anggota		1 Laporan		Revisi RKBMN Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Syafria Anggota Tim sesuai Tim Reviu RKBMN TA 2025	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi

Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran									Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran								
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
51	Tim Manajemen Pengawasan PNPB		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Hoven Fandi Ria Okta	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	Tim Manajemen Pengawasan PNPB		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Hoven Fandi Ria Okta	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		Tim Manajemem Pengawasan PNPB		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Fandy Ria Okta	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi
52									Audit SPBE		3 Maret 2025	29 Agustus 2025	Arniz Fitri Hoven Pandu Fandi Ria Okta Desi Jonathan	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Dalam rangka peningkatan Penilaian Indeks SPBE	Audit SPBE		01 Juli 2025	31 Desember 2025	Arniz Fitri D. Hoven, Pandu Fandy , Ria Okta Desi, Jonathan	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan audit
53									Tim Strategis Nasional KPK		3 Maret 2025	29 Agustus 2025	Nurlinda Almira	Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	Sebagai upaya peningkatan Indeks SPI KPK	Tim Strategis Nasional KPK		03 Maret 2025	29 Agustus 2025	Nurlinda Almira	Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	
54																		Tim Penyusun Inovasi		1 Agustus 2025	31 Desember 2025	Amiz Okdiani Irma Rahayu Citra Jonathan	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Paket	Adanya perubahan IKK dalam Perjanjian Kinerja terbaru

Inspektur

Jakarta, 26 Agustus 2025
Mengetahui,
Kepala BKN

\$

#